

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



OLEH :

WIDIA AFRIANI

2014 – 14133081

PROGRAM STUDI DIPLOMA III

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2018

PERSETUJUAN UJIAN TUGAS AKHIR
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Nama : Widia Afriani
NIM : 14133081
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2018

Diketahui Oleh

Ketua Prodi



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP.19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh

Pembimbing



Vita Fitria Sari, SE, M.Si
NIP. 19870515 201012 2 009

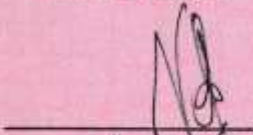
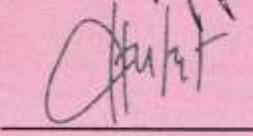
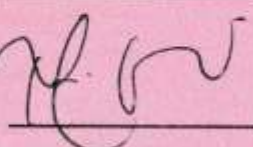
PENGESAHAN TUGAS AKHIR
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Nama : Widia Afriani
BP/NIM : 2014/14133081
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Januari 2018

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Vita Fitria Sari, SE, M.Si	
2.	Anggota I	: Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	
3.	Anggota II	: Halkadri Fitra, SE, MM, Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widia Afriani
NIM/TM : 14133081/2014
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/20 April 1996
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Keahlian : Keuangan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Bandes kapuk kalumbuk RT/RW 04/04
No. HP : 08566393448
Judul Tugas Akhir : **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (ahli madya), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantu lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya/pendapat yang telah ditulis/dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/tugas akhir ini sah, apabila telah ditandatangani **asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Januari 2018



Widia Afriani
14133081/2014

ABSTRAK

Widia Afriani : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar

Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan.

Penelitian ini menggunakan Analisis Rasio Keuangan yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Analisis SILPA dengan membandingkan praktek dan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penulis mengumpulkan data langsung dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil yang didapat, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Tanah Datar yang berada di kriteria sangat rendah. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berada di kriteria efektif. Rasio Keserasian berada di kriteria belum stabil. Rasio Pertumbuhan dan Analisis SILPA berada di kriteria tidak konsisten.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul: “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar”.

Tugas Akhir ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam Penulisan Tugas Akhir Ini, penulis sudah banyak mendapat bimbingan, dukungan, maupun bantuan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan lancar.
2. Teristimewa untuk kedua Orang Tua, Abang dan Adik serta keluarga tercinta yang tidak hentinya memberikan dukungan, do'a dan semangat setiap waktu serta menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini..
3. Bapak Dr. Idris, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNP.
4. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak. selaku Ketua Program Studi D III Fakultas Ekonomi UNP.

5. Ibu Nurzi Sebrina, SE, Ak, M.Sc. dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, nasehat, dan bimbingan dalam melanjutkan studi di Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si. selaku. selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis, yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis dalam masa perkuliahan.
8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan terutama Yati, Bunga, Pera, Syifa dan Vega yang memberikan motivasi dan semangat serta masukan-masukan demi terwujudnya impian penulis.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis.

Penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kemampuan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, 2017

Widia Afriani

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Keuangan Daerah.....	7
1. Sumber Pendapatan Daerah	9
2. Belanja Daerah	11
B. Akuntansi Keuangan Daerah	14
1. Fungsi Akuntansi Keuangan Daerah	15
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15
a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15
b. Komponen Laporan Keuangan Daerah.....	18
C. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	22
D. Analisis Rasio Keuangan Daerah	25
a. Rasio Keuangan Kemandirian Daerah	27
b. Rasio Efektifitas	28
c. Rasio Keserasian	29
d. Rasio Pertumbuhan	30
e. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32

C. Rancangan Penelitian	32
1. Jenis dan Metode Penelitian	33
2. Tahapan Penelitian	34
3. Objek Penelitian	34
4. Sumber Data.....	34
5. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Instansi.....	39
1. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar	39
2. Visi dan Misi	40
3. Struktur Organisasi	41
4. Hasil Penelitian.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Rasio Kemandirian.....	52
2. Tabel 4.2 Rasio Efektifitas	55
3. Tabel 4.3 Rasio Belanja Rutin.....	57
4. Tabel 4.4 Rasio Belanja Pembangunan.....	58
5. Tabel 4.5 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah.....	59
6. Tabel 4.6 Analisis SILPA	61

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Laporan Realisasi Belanja Kab. Tanah Datar Tahun 2012
2. Lampiran Laporan Realisasi Belanja Kab. Tanah Datar Tahun 2013
3. Lampiran Laporan Realisasi Belanja Kab. Tanah Datar Tahun 2014
4. Lampiran Laporan Realisasi Belanja Kab. Tanah Datar Tahun 2015
5. Lampiran Laporan Realisasi Belanja Kab. Tanah Datar Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi total di Indonesia adalah terciptanya *good governance* secara menyeluruh dalam membentuk Indonesia yang baru. Saat ini, *good governance* sudah menjadi tuntutan bagi bangsa Indonesia. Salah satu agenda reformasi yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah reformasi manajemen keuangan sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* di dalam pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah.

Dengan adanya reformasi ini, terjadinya banyak perubahan di berbagai bidang. Salah satu perubahan yang terjadi adalah dari pemerintahan yang berbentuk sentralistik, yaitu pemerintahan yang bertujuan menjadikan bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera secara pemerintahan terpusat, kemudian diganti dengan pemerintahan yang desentralistik. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai Pengganti UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang menetapkan bahwa pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai perwujudan otonomi daerah. Selain itu, juga dikeluarkan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang diharapkan lebih mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di daerah.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut, daerah diberi kewenangan untuk mengelola potensi yang dimiliki oleh daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Disamping pendapatan dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai pembangunan yang sudah menjadi kewenangan Daerah. Upaya pemerintah daerah dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memenuhi kesejahteraan masyarakatnya adalah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Pada prinsipnya, daerah diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang

mempunyai proporsi lebih kecil dan pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah dan sudah sewajarnya PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam era otonomi daerah.

Kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo,2009). Artinya kinerja keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah pusat dalam mengelola keuangan negara. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan negara, mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan, mengukur efisiensi belanja, serta mengukur sejauh mana kinerja keuangan dari pertumbuhan pendapatan dan belanja tiap tahunnya. Kinerja keuangan pemerintah menjadi poin penting serta topik yang menarik untuk diteliti.

Hal ini dikarenakan, dengan meneliti kinerja keuangan pemerintah dapat diketahui hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah pemerintah sudah baik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan.

Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian Kabupaten Tanah Datar digerakkan secara dominan pada sektor pertanian, pertambangan, pariwisata, dan industri pengelolaan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Berikut Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 sampai dengan 2016

Tabel 1.1 Data Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 s/d 2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
PENDAPATAN	760.003.786.356	893.108.389.961	1.004.720.140.166	1.151.898.266.369	1.188.763.795.260
Pendapatan Asli Daerah	53.691.047.586	63.835.093.787	99.694.236.763	112.072.726.548	119.065.991.694
Dana Perimbangan	706.009.114.630	827.812.535.625	903.513.077.359	1.023.390.374.543	1.062.269.282.015
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	303.624.140	1.460.760.549	1.512.826.044	16.435.165.278	7.428.521.551
BELANJA DAERAH	730.081.469.003	856.376.208.799	971.007.739	1.033.176.232.576	1.106.141.805.486
Belanja Operasi	618.271.478.434	697.398.921.624	808.384.032.897	896.128.612.628	918.248.350.898
Belanja Modal	86.485.201.226	128.063.358.873	123.046.706.609	137.034.861.538	187.784.871.556
Belanja Tak Terduga	619.421.316	47.177.454	93.500.000	12.758.410	108.583.032
Transfer	24.705.368.027	30.866.750.848	39.483.500.481	73.028.418.438	143.353.793.087
Surplus/Defisit	29.922.317.353	36.732.181.162	33.712.400.179	45.693.615.355	(60.731.803.314)
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	67.030.156.614	80.855.015.167	101.643.461.408	119.360.111.587	148.059.776.941

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Pembiayaan	16.192.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	17.000.000.000	7.206.953.426
Pembiayaan Neto	50.838.156.614	64.855.015.167	85.643.461.408	102.360.111.587	140.852.823.515
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	80.760.473.967	101.587.196.329	119.355.861.587	148.053.726.942	80.121.020.201

Berdasarkan data ada tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah kabupaten Tanah Datar meningkat selalu meningkat tahunnya. Namun, jika Pendapatan Asli Daerahnya jika di bandingkan dengan Pendapatan Tranfer jauh lebih kecil. Artinya daerah kabupaten Tanah Datar masih bergantung pada Pemerintah Pusat. Selain itu, nilai SiLPA pada tahun 2016 yang mencapai angka lebih dari 30% menjadi masalah dalam pengeloan keuangan daerah kabupaten Tanah Datar. Selain itu, berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran yang maka dapat dilakukan analisis keuangan daerah untuk mengevaluasi apakah telah menggunakan APBD secara ekonomis. Untuk menganalis anggaran dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain : analisis kemandirian daerah yaitu perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer, analisis efektifitas keuangan daerah perbandingan realisasi dan penerimaan daerah, analisis keserasian belanja adalah untuk mengetahui keseimbangan masing-masing belanja, analisis pertumbuhan untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan setiap tahunnya, dan analisis SiLPA untuk mengetahui penggunaan SiLPA apabila terjadi defisit anggaran.

Dari pemikiran yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah topik dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang analisis kinerja keuangan pada Pemerintahan Daerah kabupaten Tanah Datar.
- b. Bagi Pemerintah Daerah kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menilai kinerja keuangan.
- c. Bagi Pembaca, memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai kinerja keuangan daerah dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir bagi peneliti lain.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2012 sampai dengan 2016 rasionya masing-masing sebesar: 7,60%; 7,71%; 11,03%; 10,95%; dan 11,21%.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2012 sampai 2015 sudah berjalan efektif. Karena efektivitasnya sudah melebihi 100% yaitu sebesar 100,25% ; 100,15; 102,43%; 107,07 dan 101,35%.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari Rasio Keserasian adalah belum stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Besarnya belanja operasi berada pada kisaran 81,44%-86,71 %, rata-rata sebesar 83,82%, hal ini disebabkan oleh besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Untuk belanja modal berada pada kisaran 11,85%-16,98%, rata-rata sebesar 13,94% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan tergolong tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2012 sampai 2015. Pertumbuhan PAD dan Pertumbuhan Pendapatannya mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Besarnya persentase rasio pertumbuhan PAD berkisar antara 6% - 56%. Berturut-turut dari tahun 2012 -2016 yaitu 19%; 56%; 12%; 6%. Dan untuk rasio pertumbuhan pendapatan berkisar antara 3%-18%.. Berturut-turut dari tahun 2012-2016 yaitu 18%; 12%; 15%; 3%.
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar jika dilihat dari Analisis SILPA tidak konsisten. Bahkan pada tahun 2016 menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang cukup besar yang nilainya lebih dari 30%. Jika SILPA nilainya lebih dari 30% maka daerah harus siap menanggung pemotongan anggaran tahun berikutnya.

B. Saran

Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparatur daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat

pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diharapkan bisa menekan biaya belanja lebih kecil daripada besarnya pendapatan. Sehingga nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak melebihi 30% yang dikarenakan menutupi defisit yang cukup besar. Dan, kegiatan rencana dapat diselesaikan pada tahun anggaran dan tidak dibawa ketahun anggaran berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erlina. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007.. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- PP No. 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Suryabrata, Sumadi, 2006. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.